



**KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-19*  
(COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**MUHAMMAD HAFIZ AINI**

**NIM 1910622017**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Hafiz Aini


NIM : 19106222017

Tanggal : 20 Juli 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Hafiz Aini

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz Aini  
NIM : 1910622013  
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Ekselusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-19*  
(COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Hafiz Aini

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hafiz Aini  
NIM : 1910622017  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-19*  
(COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Ketua Penguji



Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H

Penguji I



Dr. apt. Gunawan Widjaja, S.H.,

S.Farm., M.H., M.M., M.K.M.,

M.A.R.S., ACI Arb., MSI Arb

Penguji II/Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.LM

Kepala Program Studi



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

# **KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**Muhammad Hafiz Aini**

## **ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 telah menyebarkan secara global termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 bahkan telah dinyatakan sebagai status kedaruratan kesehatan nasional di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 bertujuan membentuk *herd immunity*. Pembentukan *herd immunity* membutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia untuk divaksin dan ditargetkan tercapai pada tahun 2022. Namun vaksinasi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat timbul, bahkan ada kelompok masyarakat menolak untuk divaksin. Kelompok masyarakat ini merasa kewajiban vaksinasi melanggar hak asasi serta keraguan terhadap kualitas vaksin. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mewajibkan vaksinasi dengan ancaman sanksi administratif dan pidana yang berbeda dengan pendekatan WHO dan Negara lain. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Data penelitian menggunakan data sekunder dari literatur baik bahan hukum maupun non hukum yang berhubungan dengan vaksinasi covid di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi merupakan kebijakan yang sangat penting dalam pengendalian COVID-19. Kewajiban vaksinasi harus dilakukan demi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai konstitusi di Indonesia. Vaksinasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakomodir dan dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala dengan adanya keraguan dan penolakan pada vaksin. Kewajiban ini berdasarkan pada hukum darurat negara, utilitas, dan undang-undang yang berlaku. Kewajiban tersebut menyebabkan restriksi beberapa hak asasi. Namun penolakan vaksinasi memiliki juga potensi pelanggaran HAM karena dapat membahayakan orang lain dan negara. Pemberian sanksi baik administratif dan pidana seyogyanya menjadi *ultimum remedium*. Pendekatan persuasif dan promotif serta sosialisasi harus menjadi pendekatan awal. Namun regulasi kewajiban vaksinasi memiliki kekurangan mulai dari kesalahan prosedur pembuatan hukum hingga tidak adanya peraturan khusus mengenai pandemi COVID-19. Peraturan darurat ini, minimal setingkat PERPPU, yang khusus mengatur pandemi COVID-19 harus dimiliki karena pada situasi yang darurat/abnormal. Serta kewajiban vaksinasi kepada warga negara berimplikasi juga pada negara untuk wajib menjadi pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah berkewajiban menjalankan program vaksinasi dengan memastikan ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas COVID-19.

Kata kunci: covid-19, kewajiban, vaksinasi

# **MANDATORY CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) VACCINATION IN INDONESIA: LEGAL ASPECT**

**Muhammad Hafiz Aini**

## **ABSTRACT**

COVID-19 pandemic has spread globally and has reached a dangerous point. COVID-19 pandemic has even been declared a national health emergency in Indonesia. Various efforts have been made to overcome the Covid-19 pandemic, one of which is vaccination. The COVID-19 vaccination aims to establish herd immunity. Herd immunity requires about 70% of the population to be vaccinated. However, the vaccination raises pros and cons in the community. There are even groups of people who refuse to be vaccinated. This community group feels that mandatory vaccination violates human rights and doubts about the quality of the vaccine. The Government has taken a policy to mandate vaccination with administrative and criminal sanctions that are different from the approach of WHO and other countries. This research is a normative study with a conceptual and a normative approach analysis. Data uses secondary data from the literature, both legal and non-legal materials related to covid vaccination. The results show that vaccination is a very important policy in COVID-19 countermeasures. Mandatory vaccination must be carried out to protect all citizens according to the Indonesian constitution. Vaccination is also part of human rights that must be accommodated and implemented. However, in its implementation, there are problems with doubts and rejection of the vaccine. This obligation causes the restriction of several human rights.

However, refusal to vaccinate can violate human rights because it can harm other people and the nation. Therefore, the provision of both administrative and criminal sanctions should be the *ultimum remedium*. A persuasive and promotive approach and socialization should be the initial approach. However, the regulation of vaccination obligations has shortcomings ranging from the potential for errors in law-making procedures to the absence of an emergency regulation. This regulation, in form of Government Regulation in lie of Law, specifically for COVID-19 pandemic is a must-have due to an abnormal situation. And the obligation to vaccinate citizens also has implications for the state to be obliged to carry out vaccinations. The Government is obliged to run a vaccination program by ensuring the availability, access, acceptance, and quality of COVID-19 vaccination.

Keywords: covid-19, mandatory, vaccination

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal tesis ini dengan lancar.

Penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas tuntunan dan teladannya maka penulis selalu berupaya menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Selama mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan tesis, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Bapak/Ibu dengan nama-nama di bawah ini:

1. **Dr. apt. Gunawan Widjaja,, S.H., S.Farm., M.H., M.M., M.K.M., M.A.R.S., ACI Arb., MSI Arb.,** selaku pembimbing tesis yang telah bersedia memberikan segenap waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
2. **Dr. Abdul Halim, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan Ketua penguji yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan jurnal dan Tesis serta memberikan masukan teknis, dan saran dalam perbaikan Tesis;
3. **Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.LM.,** selaku Ketua Program Studi dan Ketua penguji yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan dukungan dan dorongan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan jurnal dan Tesis;
4. **Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.,** selaku penguji yang telah memberikan waktu, masukan teknis dan saran dalam perbaikan Tesis;
5. Ibunda tercinta, **Nur Aini** yang tidak pernah lelah memberi motivasi dan doa kepada saya selalu mendukung selama proses pendidikan dan supaya bisa menyelesaikan kuliah studi magister hukum;
6. Adik-adikku, **Ahmad Naufal Rizki Aini, Fadli Robbi Rizki Aini, Yusril Anwar Aini,** yang telah memberikan motivasi dan doanya selama pendidikan magister ini;

7. Rekan-rekan Kuliah Program Studi Hukum Program Magister Hukum UPN Veteran Jakarta angkatan 2019 yang saling memotivasi selama kuliah dan dukungan selama penyusunan Jurnal dan Tesis Hukum. **dr. Idham** yang selalu menjadi ikon, duta, dan *game changer* di Magister Hukum Angkatan 2019 ibaratnya tidak bakal sama tanpa dr idham di Magister Hukum, **dr. Melissa** yang selalu siap membantu untuk semua kondisi dan membuat semangat dengan semangatnya yang luar biasa, **drg. Rini** yang selalu memberikan semangat tanpa meninggalkan yang lain dan selalu semangat menjadi ibu para rekan-rekan magister. **drg Risa** yang selalu asyik dan teman nongkrong serta yang semangatnya tetap gelora untuk menyelesaikan program magister, **drg. Andini** yang semangatnya menjadi inspirasi untuk menyelesaikan program magister ini, **Pak Toha** yang selalu berdiskusi dengan kritis yang tetap semangat bahkan setia dengan mobilnya, **Bu Anita** yang baik hati dan dengan pemikiran kritisnya selalu diskusi dan memberi bantuan, Erlina yang masih muda dan tetap semangat dengan program magister serta selalu menjadi bendahara para rekan magister, **Bang Al** yang selalu semangat terus dengan prinsipnya dan mau belajar mengenai dunia kesehatan, **Pak Arief** yang dengan pola pikirnya selalu membuat diskusi menjadi atraktif, **Pak Berry** yang luar biasa selalu mendukung kegiatan magister, serta **Bang Joko** yang semangatnya memberikan motivasi ke saya di detik terakhir menyelesaikan tesis ini;
8. **dr. Heydi L**, selaku dokter umum hemodialisis kepercayaan saya yang selalu membantu saya di kesibukan di Rumah Sakit dan penelitian saya di bidang Kesehatan.
9. Terutama kepada ayahanda **Alm. Zulfahmi Marjohan**, semangat dan keteguhannya yang diturunkan membuat saya tidak berhenti semangat untuk terus mencari ilmu dan mengembangkan diri saya.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian dan penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan dari para pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Selanjutnya, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kesehatan.



Jakarta, 20 Juli 2021

Penulis

Muhammad Hafiz Aini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	9
I.3. Tujuan Penelitian .....	9
I.4. Manfaat Penelitian .....	9
I.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
I.4.2. Manfaat Praktis .....	10
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	10
I.5.1. Kerangka Teori .....	10
A. Teori Utilitarianisme .....	10
B. Teori Hukum Tata Negara Darurat .....	12
I.5.2. Kerangka Konseptual .....	18
I.6. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
II.1. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) .....	23
II.1.1. Kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia .....	24
II.1.2. Kebijakan Pandemi COVID-19 di Indonesia .....	26
II.2. Vaksinasi .....	29
II.2.1. <i>Clinical trial</i> (Uji Klinik) Vaksin .....	33
II.2.2. <i>Emergency Use Authorization (EUA)</i> .....	36
II.3. Vaksinasi COVID-19 .....	38
II.3.1. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia .....	41
II.3.2. Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	50
III.1. Desain Penelitian .....	50
III.2. Tipe Penelitian .....	50
III.3. Jenis Pendekatan .....	50
III.4. Sumber Data Penelitian .....	51
III.5. Cara Pengumpulan Data .....	54
III.6. Teknik Analisis Data .....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	55
IV.1. Vaksinasi dan HAM .....	55
IV.2. Kebijakan Kewajiban Vaksinasi .....	57
IV.3. Pemidanaan Bagi Penolak Vaksinasi .....	71

IV.4. Analisis Regulasi Kewajiban Vaksinasi .....	75
IV.5. Perbandingan Pelaksanaan Vaksinasi di Negara Lain.....	81
IV.6. Kewajiban Negara dalam Vaksinasi COVID-19 .....	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	86
V.1. Simpulan .....	86
V.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
RIWAYAT HIDUP .....	101